ÁL-FÂHIM

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen Strategi Pemasaran Pendidikan
Di SDIT Alam Nurul Islam Sleman
Jamaludin

Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional
Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi
(Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)
Permana Octofrezi

Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Mutu
Peserta Didik (Smk Darul Maghfiroh Di Sinar Rejeki,
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)
Andrianto

Konsep Ulul Albab
Dalam Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam
Nimas Wegig Kurniana

Analisis Kritis Kepemimpinan Pendidikan Islam
Berdasarkan Syarat Dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Ideal
Siti Qurrotul A'yuni, Radia Hijrawan

Menjadi Pemimpin Yang Efektif Dan Berpengaruh
Di Madrasah
Munganatul Khoeriyah

Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik
Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana
Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret
Safinatun Munawaroh, Rz. Ricky Satria Wiranata

Diterbitkan Oleh:

Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAIT Yogyakarta

ÁL-FÂHIM

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

ÁL-FÂHIM

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Penanggung Jawab : Danang Dwi Prasetyo
Ketua Redaksi : Rz. Ricky Satria Wiranata
Editor : Denas Hasman Nugraha
Reviewer : Syarif Hidayat
Suprih Hidayat
Tata Usaha : Sulis Ariawan
Nita Kumalasari
Penerbit : Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu
Yogyakarta
Alamat Redaksi : Jl. Mendung warih No. 125 Giwangan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. (0274) 410350, 4281163
Email : redaksialfahim@gmail.com
Website : jurnal.staitbiasjogja.ac.id

Deskripsi:

ÁL-FÂHIM adalah jurnal Manajemen Pendidikan Islam yang diterbitkan secara berkala selama enam bulan sekali oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua STAIT Jogja Nomor 001/A.KEP/STAITJOGJA/II/2019 tanggal 18 Februari 2019. Jurnal ÁL-FÂHIM adalah sarana kaum intelektual sebagai media informasi dan penyebarluasan hasil studi penelitian dan artikel ilmiah dibidang Manajemen Pendidikan Islam.

Jurnal ÁL-FÂHIM mengundang para Dosen, Pendidik dan praktisi Pendidikan Islam untuk menyumbangkan karya ilmiahnya di bidang Manajemen Pendidikan Islam. Naskah yang dikirim akan diseleksi dan dipublikasikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Karya Ilmiah yang dimuat di Jurnal ÁL-FÂHIM tidak selamanya mencerminkan pendapat redaksi.

DAFTAR ISI
Vol. 02 No. 02 September 2020

Halaman Judul	i
Editorial	ii
Daftar Isi	iii

Manajemen Strategi Pemasaran Pendidikan Di SDIT Alam Nurul Islam Sleman

<i>Jamaludin</i>	1
------------------------	---

Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)

<i>Permana Octofrezi</i>	13
--------------------------------	----

Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Mutu Peserta Didik (SMK Darul Maghfiroh Di Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)

<i>Andrianto</i>	39
------------------------	----

Konsep Ulul Albab Dalam Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam

<i>Nimas Wegig Kurniana</i>	56
-----------------------------------	----

Analisis Kritis Kepemimpinan Pendidikan Islam Berdasarkan Syarat Dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Ideal

<i>Siti Qurrotul A'yuni, Radia Hijrawan</i>	68
---	----

Menjadi Pemimpin Yang Efektif dan Berpengaruh di Madrasah

<i>Munganatul Khoeriyah</i>	84
-----------------------------------	----

Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret

<i>Safinatun Munawaroh, Rz. Ricky Satria Wiranata</i>	98
---	----

**Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam
Di Indonesia Era Reformasi
(Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)**

Permana Octofrezi.
STAI Masjid Syuhada Yogyakarta
octofrezi@gmail.com

Abstract : *This article aims to describe the National Education and Islamic Education Policy established by the government from the time of President Habibie in 1998 to President Jokowi in 2014 in the reform era. In detail, this text wants to reveal several things, namely: First, the meaning of reform; Second, what are the forms of national education policies and Islamic education in the reform era during the era of President Habibie, President Abdurrahman Wahid, President Megawati, President Susilo Bambang Yudhoyono to President Joko Widodo Volume I. This research method uses literature study or literacy. The results of this literature study show broadly that; During the Habibie era, the most striking policy was educational autonomy, where there was decentralization. Some education policies have begun to be handled by the regions, such as teacher regulation, teacher payroll, some local content curricula, all handled by the regions. After that, during the time of President Megawati, Islamic Religious Education became a compulsory subject in public universities, due to the new National Education System in 2003. During the time of President Susilo Bambang Yudhoyono, the welfare of teachers and lecturers began to be taken into account by providing certification and other honorary benefits, in addition to optimizing the 20 percent budget for education. Meanwhile, during President Jokowi's Volume I, a striking policy was the development of the latest curriculum, namely the 2013 Curriculum (K-13).*

Keywords: *Education Policy, Islamic Education Policy*

Pendahuluan

Era reformasi berimplikasi pada perubahan dan perbaikan besar-besaran di berbagai sektor baik itu ekonomi, tatanan politik, sosial hingga pendidikan yang bermuara pada rumusan kebijakan. Pada prinsipnya, kebijakan dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan merapikan tatanan berbagai sektor maupun bidang, mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang senantiasa mengikuti kemajuan zaman tanpa menggerus nilai-nilai luhur kebudayaan. Kebijakan penting diantaranya adalah kebijakan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi pada permulaan sikapnya seperti halnya Orde Baru (ORBA) terhadap Orde Lama (ORLA), yaitu berusaha mencoba membedakan dirinya dengan orde sebelumnya, yaitu orde baru. Salah satu bentuk pendidikan di zaman reformasi yang membedakan adalah diterapkannya otonomi daerah dan otonomi lembaga pendidikan, terutama

perguruan tinggi.¹² Jatuhnya Soeharto dengan kedudukannya sebagai Presiden sejak 31 tahun lamanya (sejak 12 Maret 1967) yang kemudian digantikan Habibie sebagai tanda masa transisi dari pemerintahan Orde Baru menuju Reformasi. Pemerintahan Soeharto yang dianggap sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk membawa rakyat Indonesia kearah kehidupan yang lebih baik, demokratis, aman, damai, tertib, sejahtera lahir dan batin.

Pemerintahan Soeharto dianggap telah menutup keran demokrasi dengan menggunakan Angkatan Bersenjata yang bertindak represif, melakukan monopoli, dan sentralisasi pada semua aspek kehidupan, membiarkan merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperbesar ketergantungan negara pada utang luar negeri, memberikan peluang yang terlalu besar kepada China dan pihak asing untuk menguasai asset negara. Pemerintahan Presiden Soeharto dianggap tidak berdaya lagi dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, dan karenanya perlu diganti oleh pemerintahan yang baru yang lebih reformis.¹³

Demikian pula dengan konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Ia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya. Di era Reformasi, keadaan pendidikan Islam secara umum keadaannya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintah Orde Baru. Untuk lebih memahami, berikut definisi kebijakan, fenomena dan implikasi perubahan kebijakan pendidikan pada wajah pendidikan islam yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Definisi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya membangun suatu sistem pendidikan sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang diinginkan bersama.¹⁴ Secara harfiah kebijakan pendidikan merupakan gabungan dari dua kata yakni "*education*" dan "*policy*". Kebijakan bermakna seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya sehingga kebijakan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.¹⁵

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari ruang lingkup kebijakan publik. Kebijakan publik inilah yang melibatkan campur tangan pemerintah dengan cara dan kewenangannya tertentu. Pada

¹² Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional, dari masa klasik hingga modern*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 283.

¹³Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hal : 347 – 348.

¹⁴Abdul Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta : Penerbit Samudera Biru, 2018), hal. 91.

¹⁵ HAL.A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan : dari filosofi ke implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), hal. 37.

kenyataannya memang pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik (kebijakan publik). Misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan 5 (lima) hari sekolah, kebijakan penghapusan Ujian Nasional, kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), Kebijakan kepelilikan sertifikasi akreditasi dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mencari urusan bagi semua pihak bukan hanya segelintir orang saja.¹⁶

2. Fenomena perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia dan implikasinya

Implikasi perubahan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan oleh guru, orangtua serta peserta didik. Guru, orangtua serta peserta didik harus bisa adaptif dan mau tidak mau mengikuti perubahan dan melaksanakan kebijakan baru meski menjalankannya dengan tertatih-tatih. Berikut analisis penulis tentang apa saja implikasi ataupun dampak perubahan kebijakan bagi pihak pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan peserta didik di masa yang lalu, sekarang dan masa yang akan datang :

a. Pihak Pendidik dan Tenaga kependidikan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan tergantung dari peran dan kinerja pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan. Di tangan Pendidik dan tenaga kependidikan inilah yang menentukan jalan tidaknya sebuah kebijakan. Guru yang sudah nyaman dengan kurikulum lama sekarang harus menyesuaikan diri dan merubah baik konsep, perencanaan mengajar (silabus, RPP), media mengajar, metode mengajar, evaluasi yang semua itu harus dipelajari dan diberikan pelatihan khusus semacam workshop agar Guru tidak hanya menerima. Jika dalam menerapkan kebijakan ada kendala yang membuat tidak lancar seperti kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru maka dibutuhkan komunikasi yang baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.¹⁷

Dahulu ketika orde sebelum reformasi, pendidik dan tenaga kependidikan pasif menerima apa saja kebijakan pemerintah masih menggunakan media tradisional, referensi buku manual. Sekarang di era reformasi dan masa yang akan datang tantangannya adalah Pendidik (Guru) harus bisa menguasai teknologi informasi (digitalisasi pendidikan), menguasai kemampuan akademik, pedagogik, sosial budaya, mampu berpikir kritis, mengikuti dan

¹⁶ Arwildayanto, Arifin Suing, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Bandung : Cendekia Press, 2018), hal. 11.

¹⁷ Abdul Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan ...*, hal. 91.

tanggap terhadap setiap perubahan serta mampu menyelesaikan masalah-masalah sendiri sekitar profesinya.¹⁸

Guru masa kini dan masa datang tidak lagi mendominasi kelas, tetapi sebaliknya peserta didiklah yang “sibuk” dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan Tenaga Kependidikan masa kini dan akan datang harus mampu mengoperasikan komputer, sistem informasi akademik, sistem pengarsipan digital, pendataan baik itu input dan arsip yang dilaporkan secara rutin (*sistem online*) kepada pemerintah terkait. Tenaga Kependidikan pun saat ini turut berperan membentuk karakter secara tidak langsung, memberi teladan yang baik kepada peserta didik, tidak hanya mengandalkan guru sebagai pendidik maupun mendidik karakter.

b. Pihak orang tua dan Peserta Didik

Orang tua merasa, perubahan kebijakan pendidikan misalnya perubahan kurikulum sangat drastis dan dinamis dari waktu ke waktu. Kalau dahulu buku-buku mata pelajaran bisa diwariskan turun temurun misal dari kakak ke adik-adiknya karena materinya sama. Tapi sekarang buku-buku lama tersebut tidak relevan dan tidak dipakai lagi karena materi dan kurikulumnya berubah sesuai dengan perubahan menteri dan juga perubahan zaman. Selain itu, secara substansi materi pelajaran sekarang jauh lebih rumit ketimbang era transisi atau sebelum reformasi. Materi yang dirasa lebih berat dan dinamis dari waktu ke waktu.

Anak sebagai peserta didik saat ini lebih dituntut aktif, mencari tahu sendiri, berani dan kritis dalam proses pembelajaran. Bahkan peserta didik sekarang lebih aktif mencari (*googling*) informasi/berita dan juga mengerjakan tugas dengan mengambil referensi dari internet. Ke depan, peserta didik akan mengalami kemajuan teknologi dan dinamisasi pendidikan yang berkembang terus mengikuti zaman. Orientasi belajar pada era sekarang berpusat pada siswa (*student oriented*) tidak lagi berpusat pada guru (*teacher oriented*), sehingga siswalah yang banyak mengeksplorasi pelajaran, fungsi guru saat hanya sebagai fasilitator, memandu perjalanan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan pada wajah pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang bahwa anak/siswa itu dituntut lebih pro-aktif, bisa mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi diri tidak lagi pasif dan menerima saja sebagaimana potret pendidikan dahulu.

¹⁸ Hujair AHAL. Sanaky, *Jurnal Pendidikan Islam (JPI) FIAI Jurusan Tarbiyah* : “Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan”, Volume XII, Juni 2005, hal. 35.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang diteliti berupa buku, skripsi, artikel jurnal maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian yakni mengenai kebijakan pendidikan. Peneliti mencari dan menelaah data-data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku yang membahas berbagai kebijakan setiap presiden di era reformasi, naskah kebijakan, hasil penelitian/kajian atau studi yang berhubungan dengan apa saja kebijakan pendidikan nasional maupun kebijakan pendidikan islam pada era reformasi.

Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi (*documentary study*). Prosedurnya antara lain ; pertama, dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan menggali data tertulis atau cetak seperti buku-buku, artikel jurnal, ataupun skripsi bertema politik dan kebijakan pendidikan nasional, kebijakan pendidikan islam di era reformasi. Dilengkapi dengan data elektronik berupa *web* pemerintah, berita *online*, artikel sewaktu menghimpun apa saja produk kebijakan era reformasi baik kebijakan yang bersifat nasional maupun kebijakan pendidikan islam yang senantiasa berubah, dinamis dari masa ke masa kepemimpinan. Kedua, penulis menggabungkan himpunan data-data tersebut menjadi satu kesatuan data yang dituangkan dalam hasil penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, yakni menganalisa apa saja perubahan bentuk kebijakan pendidikan, serta isi dari produk hukum yang dibuat oleh pemerintahan di era reformasi. Tentunya masing-masing kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan berbeda-beda dan berubah sesuai konteks kebutuhan dan dinamika sosial politik yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Reformasi

Kata “Reformasi” begitu populer di tahun 1998 ketika masa kemunduran Soeharto sebagai presiden setelah sekian lama berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.¹⁹ Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali, yaitu mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang didalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbarui.²⁰

¹⁹ Lihat kamus web KBBI di <https://kbbi.web.id/reformasi.html>

²⁰ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam, dari masa Rasulullah hingga reformasi di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal. 225.

Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era Reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbenyung lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era Reformasi.²¹

B. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam Era Reformasi

Pada masa ke masa pemerintahan, Indonesia telah banyak menerbitkan kebijakan pendidikan yang sifatnya nasional maupun keagamaan. Kebijakan yang terkait dengan pendidikan islam atau kegamaan menjadi selaras dan sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional karena kebijakan pendidikan islam menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan hukum baik berupa Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang sekarang berubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun landasan lain yang relevan.

Pemangku kebijakan antara lain Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) selaku pemrakarsa kebijakan. Sedangkan unsur pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan adalah PASKA (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Tugas PASKA diatur dalam pasal 766 Permendikbud No. 11 Tahun 2018 yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana Kementerian.²²

Kebijakan pendidikan dari masa ke masa pemerintahan akan penulis jabarkan di setiap periode. Mulai dari Periode Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) sampai Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014 – 2019).

1. Kebijakan Presiden Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie (terhitung tanggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Adapun kebijakan pendidikan pada periode pemerintahan Presiden Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie yang memerintah sejak tanggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 sebagai berikut : ²³

a. Kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK.

Lembaga ilmiah seperti kampus atau perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Meninjau kembali

²¹ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 347.

²² Lihat Neraca Pendidikan Daerah dengan judul “*Sekilas tentang PASKA*”, pada web www.npd.kemdikbud.go.id

²³ Muhammad Rifa’i, *Sejarah Pendidikan Nasional, dari masa klasik hingga modern*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 261 – 265.

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan BKK yang terjadi sejak orde baru dengan mencabut aturan-aturan yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa.

b. Status PTN berubah menjadi BHMN.

Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang tertuang dalam PP 61/1999 dan PP 153/2000. Sejak saat itu Perguruan Tinggi dituntut mencari dana secara mandiri untuk membiayai pendidikannya. Dalam perkembangannya persoalan ini menjadi pangkal dari masalah komersialisasi pendidikan yang menjadikan biaya pendidikan semakin mahal untuk diakses kalangan masyarakat bawah.

c. Produk Hukum

Pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

- 1) Kepres RI No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen
- 2) PP tahun 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP 61 Tahun 1999 Tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum
- 4) Otonomi Pendidikan.

Pada era Presiden B.J Habibi, ditetapkan kebijakan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini, peran daerah dimunculkan dan tidak tergantung oleh pusat. Pendidikan tidak lagi sentralisasi tetapi lebih desentralisasi dan otonomi. Artinya banyak hal sudah dipercayakan untuk ditangani dan dikelola oleh daerah atau bahkan sekolah. Beberapa kebijakan pendidikan mulai ditangani Dati Tk II. Soal Pengaturan Guru, penggajian guru, beberapa kurikulum muatan lokal semua ditangani daerah. Pemerintah pusat hanya akan memberikan pengarahan dan juga mengatur hal yang dianggap pokok.²⁴

2. Kebijakan Pendidikan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur yang hanya sebentar kurang dari dua tahun tidak banyak kebijakan yang dibuat terkait dengan pendidikan :

a. UU perimbangan keuangan ke daerah

²⁴ Paul Suparno dkk, *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002), hal. 19-20.

Menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat dengan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

UU ini seakan memberikan angin segar bagi pendidikan, yakni kebijakan tidak lagi di tangan pusat tetapi pindah ke tangan daerah selaku eksekutor kebijakan di tingkat lokal. Pada zaman Gus Dur inilah dikenal karena meningkatkan gaji guru secara signifikan²⁵

b. Produk Hukum

Pada pemerintahan Presiden Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :²⁶

- 1) Kepmendiknas No. 042/U/2000 tentang persyaratan dan tata cara penutupan perguruan tinggi sebagai badan hukum
 - 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
 - 3) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang pedoman perguruan tinggi
 - 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 37/C/KEP/PP2000 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir
3. Kebijakan Pendidikan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

Kebijakan Pendidikan Era Pemerintahan Presiden Megawati dapat dikemukakan sebagai berikut : ²⁷

a. PAI menjadi Mata kuliah wajib di PTU.

Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang menjadi kelanjutan dari pengajaran yang diterima peserta didik mulai dari tingkat TK sampai SMA. Landasan penyelenggaraan mata kuliah PAI di PTU mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 263/Dikti/Kep/2000 yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2001 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Mata Kuliah PAI di PTU bermuatan 2 sks.²⁸

²⁵ Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional...*, hal. 263.

²⁶ Paul Suparno dkk, *Reformasi Pendidikan...*, hal. 264.

²⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 347 .

²⁸ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam, napaktilas perubahan konsep, filsafat dan metodologi pendidikan islam dari era nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), hal : 397 – 398.

b. Pemantapan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Sisdiknas

Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jika pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, ma'had Ali, Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), dan Majelis Taklim. Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi ilmu pengetahuan.²⁹

c. Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Kebijakan ini menerapkan setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau *Tsanawiyah*. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.³⁰

d. Mata Pelajaran PAI menjadi prioritas urutan pertama pada UU Sisdiknas 2003

Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi urutan posisi nomor 1 (satu) sebelum mata pelajaran lain, diikuti mata pelajaran Kewarganegaraan urutan kedua, dan seterusnya. Hal ini suatu hal yang amat menggembirakan bagi umat muslim Indonesia, karena secara urutan mata pelajaran dibandingkan UU Sisdiknas sebelumnya (Sisdiknas 1985) yang memposisikan mata pelajaran PAI nomor kedua setelah mata pelajaran PPKn.

²⁹.Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 347

³⁰ *Ibid*, hal., 354.

- e. Pengembangan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2002 dan Kurikulum 2004 (KBK).

Penyempurnaan kurikulum ini dibuat sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kurikulum ini dikembangkan namanya menjadi kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum 2002 menjadi cikal bakal kurikulum 2004 yang dikena dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi.³¹

- f. Produk Hukum

Pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

- 1) Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen
- 2) Kepmendiknas No. 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh
- 3) Kepmendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi
- 4) Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi.
- 5) Kepmendiknas No. 004/U/2002 tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi
- 6) Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi
- 7) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

- 4. Kebijakan Pendidikan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (terhitung 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

Pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua dekade pemerintahan (sepuluh tahun) telah banyak memberikan kebijakan dan perbaikan dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan itu antara lain :

- a. Munculnya KKNI

Pada tanggal 17 januari 2012 Presiden mengeluarkan peraturan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan kurikulum pada setiap Perguruan Tinggi. Jika pada satuan pendidikan dasar dan menengah

³¹ Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung : PT remaja Rosdakarya, 2013), hal., 13.

menggunakan Kurikulum 2013 (K-13), maka Kurikulum Perguruan Tinggi mengacu pada KKNI yang diterbitkan Presiden SBY.³²

- b. Pemenuhan anggaran 20 % APBN untuk pendidikan.

Meskipun sudah dicanangkan pada masa presiden sebelumnya, namun setelah dievaluasi belum optimal dan menyeluruh maka di zaman Presiden SBY jilid 2 sejak tahun 2009, kebutuhan tersebut direalisasikan secara optimal. UU No. 20 Tahun 2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah acuan wajib pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran sebesar dalam APBN. Turunan dari komitmen ini adalah dana BOS Pendidikan, Program Bidikmisi, dan berbagai pendanaan lainnya.

- c. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah (BOS)).

Menurut peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sasaran BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMPT, TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi.³³

- d. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuju sekolah bermutu

Presiden SBY menerbitkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tanggal 16 Mei 2005. Ini juga tonggak penting dalam mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 (delapan) standar nasional.

- e. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

³² Lihat Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

³³ Lihat artikel "Sekilas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)" di web www.dikbud.pulaumorotaikab.go.id, diakses tanggal 19 Januari 2020, pukul 11.23 wib.

Sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2010, menjadi panduan pada pengelolaan di setiap satuan pendidikan yang bermuara pada penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS), terutama dalam upaya peningkatan kemampuan manajerial dan *leadership* para kepala sekolah/kepala Madrasah di Indonesia.

f. SBN dan SBI

Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.

g. Sertifikasi Guru dan Dosen.

Kebijakan ini diperuntukkan bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait erat dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Program Sertifikasi pendidik dalam rangka memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Tujuannya mewujudkan guru-guru yang profesional. Guru yang profesional akan berimbas pada kualitas pendidikan dan anak-anak didiknya. Keprofesionalan ini dibuktikan dengan sertifikat profesional. Kompensasi profesional adalah tunjangan sertifikasi³⁴

h. Kurikulum KBK dan KTSP.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006) Melalui kurikulum ini para peserta didik dituntut tidak hanya menguasai materi pelajaran (*subject matter*) sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999. Melainkan dituntut untuk memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisa.

i. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid.

Pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teacher centris*) melalui kegiatan *teaching*,

³⁴ Dikutip dari artikel Kompasiana.com dengan judul “Kebijakan Strategis Era SBY”, Saprudin Padlil Syahal.

melainkan juga berpusat pada murid (*student centris*) melalui kegiatan *learning* (belajar) dan *research* (meneliti) dalam suasana yang partisipatif, inovatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).³⁵

- j. Implementasi manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan.

Implementasi manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan (*to give good service and satisfaction for all customers*) sebagaimana yang terdapat pada konsep *Total Quality Management* (TQM). Berkaitan dengan hal tersebut, pada era reformasi ini digagaslah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meliputi beberapa standar : ³⁶

- 1) Standar Isi (Kurikulum)
- 2) Standar Mutu Pendidikan
- 3) Standar Proses Pendidikan
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Pengelolaan
- 6) Standar Pembiayaan
- 7) Standar Penilaian
- 8) Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan.

Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (*Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah*) ini, selain pelajaran agama, para siswa juga memperoleh pelajaran umum sebagaimana terdapat di sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Selain itu ada perubahan IAIN menjadi UIN. Dengan kebijakan tersebut, tidak mustahil jika suatu saat madrasah/UIN menjadi pilihan utama masyarakat.³⁷

- k. Profesionalisasi Profesi Guru.

Pada awal pemerintahannya, DPR mengesahkan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai tindak lanjut, SBY menerbitkan PP No. 74 Tahun 2008. Dua landasan hukum inilah yang mengubah wajah profesi guru menjadi sebuah profesi yang tidak bisa diremehkan. Guru dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Sejak saat itu guru yang belum menempuh sarjana/S1 termotivasi untuk studi lanjut hingga

³⁵ Prof.Dr.HAL.Abuddin Nata, M.A, *Sejarah Pendidikan Islam...*,hal. 357.

³⁶ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam, dari masa Rasulullah hingga reformasi di Indonesia*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hal. 231.

³⁷ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hal. 231.

S1/D4 baik biaya mandiri ataupun dukungan bantuan bea studi dari pemerintah.

l. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen.

Presiden SBY menerbitkan PP No. 41 tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor. Tunjangan ini menghapus kegelisahan para guru. Guru PNS mendapat dua tunjangan : Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS daerah non-TPP. sedangkan Guru Non-PNS minimal mendapat tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan bagi guru non-PNS. Hal ini juga berlaku pada Dosen dan Guru Besar.³⁸

m. Perubahan Departemen menjadi Kementerian

Melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara. Peraturan Presiden ini dikeluarkan pada tanggal 3 November 2009 oleh Presiden SBY. Sejak saat itu semua nama Departemen berubah, mulai dari Departemen Agama (Depag) berubah menjadi Kementerian Agama (disingkat Kemenag), Departemen Luar Negeri dirubah menjadi Kementerian Luar Negeri dan Departemen-depatemen lainnya yang diubah.

n. Penghapusan SBI atau SIBI, istilah sekolah bertaraf Internasional

Setelah beberapa masa diberlakukan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional (RSBI), Pada tahun 2013 kebijakan tersebut dihapus atau dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun alasan MK membatalkan RSBI antara lain ; pertama, MK tidak menafikan pentingnya bahasa inggris, tetapi istilah Internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa indonesia. Kedua, lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi tetapi tidak harus berlabel berstandar Internasional. Ketiga, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah SBI/RSBI dan sekolah non SBI.³⁹

Keputusan ini menjadi pro dan kontra pada masa itu. Juru bicara MK, M. Akil Mochtar menyatakan, status sekolah bakal disamakan alias harus berstatus nasional. Akil menilai status

³⁸ Dari politiktoday.com "*Membaca enam cetak tangan SBY dalam sektor pendidikan Indonesia*", rabu, 22 Januari 2020, pukul 16.14 wib.

³⁹ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, *Jurnal Politica* : "Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)", Vol. 4 No. 2 November 2013, hal. 266.

SBI/RSBI dijadikan pihak tertentu untuk mereguk keuntungan sendiri. Caranya dengan menarik tarif mahal kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Hakim MK berpendapat SBI/RSBI cenderung mendapatkan sarana, pembiayaan, maupun *output* pendidikan yang lebih baik ketimbang sekolah umum. Padahal jumlah SBI/RSBI masih terbatas dan tidak dapat menampung seluruh siswa.⁴⁰

o. Implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas.

Kurikulum 2013 yang dikenal dengan K-13 merupakan produk kurikulum pemerintah yang dicanangkan sejak dikeluarkannya Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013. Kurikulum ini belum bisa diwujudkan secara sempurna dan menyeluruh di setiap jenjang kelas pada satuan pendidikan karena dalam masa transisi dengan kurikulum lama yakni kurikulum KTSP. Sehingga dalam pelaksanaannya beberapa jenjang masih menggunakan Kurikulum KTSP dan beberapa jenjang mulai mengimplementasikan K-13, itupun secara bertahap.

p. Produk Hukum.

Pada pemerintahan Presiden SBY, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

- 1) UU No. 20 Tahun 2003
- 2) Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah acuan tonggak dari kewajiban pemerintah menyediakan anggaran sebesar 20 persen dalam APBN
- 3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tanggal 16 Mei 2005
- 4) PP No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
- 5) Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 7) Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009
- 8) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 9) Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah

⁴⁰ Saiful Munir, Skripsi : *Analisis Framing Berita Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) Pada Harian Republika Edisi Januari 2013*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 64-69.

Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- 10) PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
 - 11) PP No. 41 tahun 2009 tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor
 - 12) Permendiknas No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 13) Permendiknas No. 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.
 - 14) PP No. 66 Tahun 2010 Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - 15) UU RI Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Kebijakan Pendidikan Era Presiden Joko Widodo Jilid 1 (20 Oktober 2014 – 2019)

Pada era presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam satu dekade pemerintahannya telah menetapkan beberapa kebijakan. Sebagian besar meneruskan kebijakan yang telah dijalankan di era sebelumnya yaitu era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selebihnya membuat kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan itu antara lain:

- a. UN bukan penentu kelulusan.

UN tidak lagi jadi penentu satu-satunya kelulusan siswa, pihak guru dan sekolah memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. serta secara teknis mengubah teknis ujian menjadi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).⁴¹ Sistem ini ditempuh dengan harapan meminimalisir kecurangan dalam Ujian.

- b. Peralihan UN menjadi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Ujian Nasional tidak lagi menggunakan media kertas melainkan berbasis komputer. Sistem ujian dikenal dengan nama UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). PR pada masa ini adalah masing-masing satuan pendidikan harus menyiapkan sarana dan prasarana berupa komputer dan jaringannya yang memadai sebagai standar pelaksanaan UNBK.

- c. Implementasi kurikulum 2013 (K-13) secara menyeluruh.

Pada awal kebijakan kurikulum ini baru diterapkan, Mendikbud Anies Baswedan sempat menunda implementasi K-13, dan mengimplementasikan K-13 secara bertahap setelah melalui telaah ulang, revisi konsep dan dokumen kurikulum yang melibatkan publik. Secara perdana pada tahun akademik 2013-2014 sudah dimulai, kemudian secara resmi mulai diterapkan menyeluruh dan serentak se-Indonesia tahun akademik 2014-2015.

⁴¹ Lihat artikel di www.blog.ruangguru.com diakses pada tanggal 21 januari 2020, pukul 05.23 wib

Kurikulum ini mengalami beberapa kali revisi ataupun penyempurnaan dari tahun ke tahun, diantaranya Revisi Tahun 2017, Revisi Tahun 2018. Tahun 2020 nanti ditargetkan penerapan Kurikulum 2013 (K-13) secara merata diseluruh tingkatan tiap satuan pendidikan.

d. Hari Santri Nasional

Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional dengan membuat Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015. Mulai tahun itu setiap santri, madrasah dan pesantren selalu menyambut tanggal 22 Oktober sebagai hari bersejarah dengan berbagai aneka kegiatan. Pemerintah saat ini mengakui sejarah perjuangan dan kepahlawanan Kyai dan Santri melawan penjajah dengan resolusi jihad dari Kyai Hasyim pada tanggal 22 Oktober.

Mereka yang berjuang itu antara lain K.H. Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, A. Hasan dari PERSIS, Ahmad Syurkati dari Al-irsyad dan Abdul Rahman dari Matlaul Anwar. Selain itu, para perwira/prajurit pembela Indonesia ternyata banyak dari kalangan santri. Dengan adanya sejarah tersebut pemerintah perlu menetapkan hari santri sebagai upaya penghargaan kepada pejuang dari kaum kyai dan santri yang bersama-sama melawan penjajah.⁴²

e. Guru garis depan daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)

Program Guru Garis Depan (GGD) merupakan program afirmasipemerintah untuk dapat mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3 T. Hal ini sesuai dengan semangat nawacita, membangun dari pinggiran dan meningkatkan kualitas manusia.⁴³ Antusiasme masyarakat cukup tinggi menyambut program ini terutama generasi muda yang *fresh graduate* mengikuti program ini dan beminat menjadi salah satu Guru GGD.

f. Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

⁴² Dikutip dari berita www.mediajabar.com artikel "Sejarah kenapa tanggal 22 oktober dijadikan hari santri nasional", diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 12.00 wib.

⁴³ Dikutip dari artikel kemdikbud.go.id dengan judul "Guru Garis Depan Untuk Memperkuat Kinerja Daerah di Bidang Pendidikan".

Mendikbud menyampaikan bahwa program ini bertujuan mencegah generasi putus sekolah. Kebijakan ini masih dievaluasi hingga saat ini.⁴⁴

g. Sistem Zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Pada Tahun 2017, dikeluarkanlah sistem zonasi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dikomandoi Sang Menteri, Muhadjir Effendy. Dibawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sistem zonasi ini adalah bagian upaya dari pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi bahkan menghapus ketimpangan kualitas pendidikan terutama di sistem persekolahan.⁴⁵

Tidak ada lagi istilah sekolah unggul dan tidak unggul, sekolah favorit maupun sekolah yang kurang favorit. Kebijakan zonasi pada PPDB ini sesuai dengan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Kebijakan ini masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di era Mendikbud Nadiem Makarim yang baru, sistem ini tetap diteruskan di era Presiden Jokowi jilid 2 tetapi mengalami perubahan sistem pelaksanaannya yang lebih fleksibel dan memberikan kepercayaan kepada daerah yang berwenang sebagai penentu final sesuai dengan rambu-rambu dari pemerintah.

h. Konsep "HOTS" pada pembelajaran dan pembuatan soal ujian

Pada tahun 2017 pula, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis HOTS "*High Order Thinking Skill*", dimana guru diharapkan mampu mengemas pembelajaran dan penilaian dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan mengevaluasi (membuat soal) mulai dari soal Penilaian tengah dan akhir semester maupun ujian bertaraf nasional (USBN). Kemampuan berpikir dengan nalar tinggi mengacu pada dimensi berpikir Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krawthl dengan ranah berpikir *Cognitive* (C) tingkat C4-C6 yang meliputi : C4 (Menganalisis), C5 (Mengevaluasi) dan C6

⁴⁴ Dikutip dari web kemenkeu.go.id dengan judul artikel : "*Ayo Belajar! Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar*" diakses tanggal 25 Januari 2020 pukul 12.10 wib.

⁴⁵ Dikutip dari artikel "*Semua bisa Sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang berkualitas*" dari web www.kominfo.go.id, diakses tanggal 19 Januari 2020, pukul 09.22 wib.

(Mengkreasi/Mencipta). HOTS juga diterapkan pada ujian PPG, tes seleski CPNS/ASN.

i. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

PP No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), PP No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

j. Adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Bagi sarjana yang ingin menjadi seorang guru atau guru yang sudah mengajar beberapa tahun tetapi belum mendapat sertifikat pendidik maka harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru dalam kurun waktu tertentu. Ada dua jenis PPG, yakni PPG Pra-Jabatan (disingkat PPG Prajab)⁴⁶ dan PPG dalam jabatan (disingkat PPG Daljab). Dahulu, kebijakan lama menentukan bahwa hanya yang menempuh pendidikan linierlah yang boleh menjadi guru, misal untuk menjadi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) maka harus memiliki ijazah sarjana Pendidikan Agama Islam saja.

Di era globalisasi ini dan aturan pemerintah terbaru, menjadi guru PAI tidak harus mengambil dari sarjana pendidikan agama islam yang linier, tapi membuka peluang bagi sarjana bidang agama lainnya atau program studi agama yang tidak linier misalnya : sarjana ushuluddin, sarjana sejarah kebudayaan islam, sarjana ilmu Al-Qur'an, Ilmu Hadits dan lulusan program studi agama lainnya. Sehingga menjadi kompetisi antar lulusan program studi bidang agama.

Melalui PPG ini guru diberikan bekal dan serangkaian persyaratan untuk memenuhi kualifikasi menjadi seorang guru. Peserta PPG mengikuti ujian/tes tertentu, pada tahap akhir bagi yang lulus maka layak dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik (sertifikasi). Karena menjadi guru adalah profesi. Guru yang sudah lolos akan mendapatkan gelar "Gr" di belakang namanya.

k. Produk Hukum.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan baik yang sesuai dengan rincian kebijakan diatas maupun selainnya, yaitu :

⁴⁶ Lihat salinan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

- 1) PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- 2) PP No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- 3) Permendikbud No. 80 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah.
- 4) Permendikbud No. 20, 21, 22 dan 23 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
- 5) PP No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- 6) PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- 7) Permendikbud No. 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OTK).
- 8) Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tat kerja satuan pendidikan dasar dan menengah
- 9) Permendikbud No. 20 Tahun 2019 tentang perubahan permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB⁴⁷

Itulah rangkaian panjang kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan islam dari masa ke masa kepresidenan. Ada produk atau bentuk kebijakan pasti ada juga landasan hukumnya yang menguatkan. Landasan hukum berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu sendiri bisa terus dijadikan pedoman dan dipakai terus selagi masih relevan dengan kehidupan saat ini. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan pergantian pemerintahan yang berbeda prinsip, berbeda visi maka terbuka kemungkinan dibuatkannya kebijakan baru karena harus adaptif terhadap kebutuhan suatu negara.

Dari rincian panjang kebijakan-kebijakan di atas dapat diringkas menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam
dari masa ke masa kepresidenan (Habibie – Jokowi Jilid I)

Presiden	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Periodeisasi & Nama Kabinet	Kebijakan Pendidikan
----------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------

⁴⁷ Dikutip dari web Jogloabang.com, pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 13.51 WIB

Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie	Prof. Dr. Juwono Sudarsono	23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan)	a. Kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK. b. Status PTN berubah menjadi BHMN. c. Otonomi Pendidikan.
K.H. Abdurrah man Wachid	Dr. Yahya Muhaimin	26 Oktober 1999 – 23 Juli 2001(Kabinet Persatuan Nasional I)	a. Adanya persyaratan dan tata cara penutupan perguruan tinggi sebagai badan hukum b. Pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa. c. Pedoman perguruan tinggi
Megawati Soekarno Putri	Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar	10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 (Kabinet Gotong Royong)	a. PAI menjadi Mata kuliah wajib di PTU. b. Program wajib belajar 9 tahun. c. Mata Pelajaran PAI menjadi urutan pertama pada UU Sisdiknas 2003 d. Pengembangan kurikulum menjadi kurikulum 2004 (KBK). e. Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen f. Penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh g. Tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi h. Pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi. i. Tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi j. Tentang kurikulum inti perguruan tinggi k. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional l. Madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan.
Prof. Dr.	Prof. Dr.	21 Oktober 2004 –	a. Munculnya KKNi

Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. (SBY) Jilid 1	Bambang Soedibyo, MBA.	20 Oktober 2009 (Kabinet Indonesia Bersatu)	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemenuhan anggaran 20 % APBN untuk pendidikan. c. Dana BOS d. Standar Nasional Pendidikan (SNP) e. Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. f. SBN dan SBI g. Sertifikasi Guru dan Dosen. h. Kurikulum KBK dan KTSP. i. Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid, tidak hanya guru j. Manajemen berorientasi pada layanan. k. Profesionalisasi Profesi Guru. l. Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen. m. Perubahan Departemen menjadi Kementerian n. Penghapusan SBI atau SIBI o. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 p. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah q. UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen r. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 s. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. t. Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono	Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.	22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014 (Kabinet Indonesia Bersatu)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencanangan perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 (K-13) b. PP No. 66 Tahun 2010 Penataan

no, M.A. (SBY) Jilid 2		jilid II)	<p>pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>c. Tentang tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor</p> <p>d. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.</p> <p>e. Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.</p> <p>f. UU RI Nomor 12 Tentang Pendidikan Tinggi</p>
Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) Jilid I	H. Anies Baswedan, Ph.D.	27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016 (Kabinet Kerja Jilid I)	<p>a. Mengubah UN bukan sebagai tolak ukur kelulusan</p> <p>b. UN menjadi UNBK</p> <p>c. Program Uji Kompetensi Guru (UKG)</p> <p>d. Implementasi kurikulum 2013 (K-13) secara menyeluruh.</p> <p>e. Hari Santri Nasional</p> <p>f. Guru Garis Depan daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal)</p> <p>g. Kartu Indonesia Pintar (KIP)</p>
	Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.	27 Juli 2016 – Oktober 2019 (Kabinet Kerja)	<p>a. Sistem Zonasi pada PPDB</p> <p>b. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajab dan Daljab</p> <p>c. Konsep “HOTS” dalam pembelajaran dan pembuatan Soal</p> <p>d. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)</p> <p>e. Pendidikan Profesi Guru (PPG)</p>

Kesimpulan

Hikmah dari perjalanan kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan islam di era reformasi tersebut bahwa setiap masa atau periode memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing pemerintahan dalam menerapkan kebijakan pendidikannya, tergantung problematika yang dialami, potensi Sumber Daya Manusia yang ada, dan nominal anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari masa ke masa kepresidenan, ada yang sifatnya meneruskan kebijakan pemerintahan yang lama, memperbaharui kebijakan yang sudah ada sampai mengganti kebijakan lama dengan kebijakan yang baru dan berbeda dari sebelumnya.

Pada masa Presiden Habibie, kebijakan antara lain : kampus bebas dari intervensi dan peninjauan Normalisasi Kehidupan Kampus, status PTN berubah menjadi BHMN, serta Otonomi Pendidikan. Pada masa Presiden Gus Dur, tidak banyak kebijakan yang dibuat berhubung masa pemerintahannya yang singkat, yakni kurang dari dua tahun. Produk kebijakannya antara lain : adanya Undang-undang tentang persyaratan dan tata cara penutupan perguruan tinggi sebagai badan hukum, pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan pedoman perguruan tinggi.

Pada masa Presiden Megawati kebijakan berupa PAI menjadi Mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Umum, Program wajib belajar 9 tahun, Sisdiknas 2003, kurikulum 2004 (KBK), Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, Penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh, ketentuan gelar dan lulusan perguruan tinggi, Pedoman pengawasan-pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi, akreditasi program studi pada perguruan tinggi, kurikulum inti perguruan tinggi, Madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan.

Pada masa Presiden SBY muncul kebijakan KKNi, Optimalisasi 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), SBN dan SBI, Sertifikasi Guru dan Dosen, Kurikulum KBK dan KTSP, Pendekatan pembelajaran berpusat pada murid tidak hanya guru, Manajemen berorientasi pada layanan, Profesionalisasi Profesi Guru, Peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen, dan lain lain.

Pada masa Presiden Jokowi berbuah kebijakan antara lain ; Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), UN tidak lagi menjadi tolak ukur kelulusan, Ujian Kompetensi Guru (UKG), Konsep HOTS, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Pendidikan Profesi Guru (PPG), Implementasi Kurikulum 2013, Guru Garis Depan, Sistem Zonasi pada PPDB, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir. *Sejarah Pendidikan Islam, dari masa Rasulullah hingga reformasi di Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2015.
- Abdul Majid. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta : Samudera Biru. 2018.
- Abuddin Nata, M.A. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Raja Grafindo. 2011.
- Arwildayanto, Arifin Suling, Warni Tune Sumar. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press. 2018.
- H.A. Rusdiana. *Kebijakan Pendidikan: dari filosofi ke implementasi*. Bandung : Pustaka Setia. 2015.
- Muhammad Rifa'i. *Sejarah Pendidikan Nasional, Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media. 2011.
- Paul Suparno dkk. *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2002.
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam, napaktilas perubahan konsep, filsafat dan metodologi pendidikan islam dari era nabi SAW sampai Ulama Nusantara*, Jakarta : Kalam Mulia. 2011.
- Sholeh Hidayat. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Dewi Sendhikasari Dharmaningtias. *Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)*. Jurnal Politica, Vol. 4 No. 2 November 2013.
- Hujair AH. Sanaky, *Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Islam (JPI) FIAI Jurusan Tarbiyah, Vol. XII, Juni 2005.
- Saiful Munir, Skripsi : *Analisis Framing Berita Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) Pada Harian Republika Edisi Januari 2013*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2013.
- Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Salinan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
- Salinan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 Tentang perubahan permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB
- Saprudin Padlil Syah. (2019, 19 Januari). *Kebijakan Strategis Era SBY*. Diperoleh dari
"<https://www.kompasiana.com/padlilisyah/54f39506745513a32b6c7a5b/kebijakan-pendidikan-strategis-era-sby>"
- Ahmad. (2019, 25 Januari). *Sejarah kenapa tanggal 22 oktober dijadikan hari santri nasional*. Diperoleh dari <https://www.mediajabar.com/khas/sejarah-kenapa-tanggal-22-oktober-dijadikan-hari-santri-nasional>
- Sekilas tentang PASKA. (2018). Diperoleh dari
<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=about>

- Sekilas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Tanpa Tahun). Diperoleh dari <https://dikbud.pulaumorotaikab.go.id/infobos>
- Membaca enam cetak tangan SBY dalam sektor pendidikan Indonesia (2017). Diperoleh dari <http://politiktoday.com/2017/05/membaca-6-cetak-tangan-sby-dalam-sektor-pendidikan-indonesia/>
- Guru Garis Depan Untuk Memperkuat Kinerja Daerah di Bidang Pendidikan. (2017). Diperoleh dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/guru-garis-depan-untuk-memperkuat-kinerja-daerah-di-bidang-pendidikan>
- Semua bisa sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang berkualitas. (Tanpa Tahun). Diperoleh dari https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr
- Pengertian reformasi, diperoleh dari web <https://kbbi.web.id/reformasi.html>